

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Karena begitu eratnya keterkaitan antara keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan banyak menimbulkan berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan (Farhan, 2015, 7).

Sesuai dengan amanat UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Pusat menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual ini harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang tentang keuangan Negara pertama kali disahkan atau lebih tepatnya tahun 2008, sistem akuntansi pemerintah sudah berbasis akrual. Sebagai pedoman dalam pengimplementasian sistem tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Selama 5 tahun tersebut, sistem akuntansi akrual penuh belum dapat diimplementasikan dan sebagai masa

transisi sistem yang digunakan adalah sistem kas menuju akrual (Cash Basis towards Accrual). Pada kenyataannya setelah tahun 2008 masih banyak yang harus dilakukan persiapan-persiapan dan penyempurnaan-penyempurnaan sehingga terjadi penundaan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini telah disepakati antara pemerintah dengan DPR yang dituangkan dalam UU Pertanggungjawaban APBN dan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Berbasis Akrual) sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005.

Persiapan yang telah dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntansi akrual, diantaranya memberikan pelatihan ke satker-satker (sebanyak 24000 satker) sebagai pelatihan awal, penyiapan teknologi informasi, dan persiapan dana yang dibutuhkan. Untuk persiapan penyelenggaraan pelatihan, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) (Binsar, 2015, 20).

Pada tahun 2015 seluruh satker sudah diwajibkan melaksanakan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual penuh. Sebagai gantinya, pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengembangkan aplikasi akuntansi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA). Sstem ini merupakan modifikasi danri aplikasi SAKPA yang selama ini telah

familiar digunakan oleh seluruh satker yang ada sehingga para satker tidak akan mengalami kesulitan untuk mempelajari aplikasi SAIBA.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas 86 entitas yang secara keseluruhan BPK mengapresiasi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan jajarannya yang telah berupaya menjaga kualitas laporan keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak signifikannya penurunan kualitas laporan keuangan pada penerapan SAP berbasis akrual untuk pertama kalinya. Terjaganya kualitas laporan keuangan tersebut terlihat dari jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk tahun 2015, sebanyak 56 K/L memperoleh opini tertinggi dari BPK tersebut. Selanjutnya, tercatat 26 K/L memperoleh opini WDP serta empat K/L memperoleh opini *Disclaimer* (Tidak Menyatakan Pendapat) (Mulyani, 2016, 5).

Dalam rangka mendukung penerapan basis akuntansi akrual, penggunaan teknologi yang andal amat diperlukan guna mendukung keberhasilan pengolahan data baik pada masa transisi maupun pada masa penerapan basis akrual secara penuh. Persiapan di bidang teknologi informasi terutama diarahkan untuk pengembangan sistem akuntansi dan dilakukannya pelatihan aplikasi akuntansi basis akrual yang akan digunakan oleh operator SAI dalam penyusunan laporan keuangan.

Pada hari Selasa, 8 Juni 2016, di Bandung, Jawa Barat, Menteri Luar Negeri secara resmi membuka kegiatan Pemantapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dan Sistem

Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Kegiatan Pemantapan SAI, diselenggarakan oleh Biro Keuangan dan Biro Umum serta berlangsung dari tanggal 7 – 16 Juni 2016, dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas BPKRT dan Operator SAI dalam membuat pertanggungjawaban keuangan Kementerian yang mencakup uang dan barang. Kegiatan ini diikuti oleh 354 peserta dengan rincian 280 peserta berasal dari Perwakilan RI dan 74 peserta dari Kementerian Luar Negeri (Siaran Pers Kemlu, 2016).

Kementrian Luar Negeri dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendapatkan alokasi anggaran pemerintah berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang harus dipertanggungjawabkan keuangannya. Implementasi SAI sangat besar pengaruhnya terhadap satker. Kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat berdampak buruk bagi kinerja satker tersebut di masa mendatang, karena satker akan mendapatkan sanksi apabila hal itu terjadi.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, kejujuran (*shidq*) adalah suatu kewajiban yang menggambarkan informasi transaksi secara jujur serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Oleh karena itu berdasarkan kaidah tersebut maka, menerapkan kejujuran dalam penyusunan laporan keuangan adalah wajib. Dalam pandangan Islam, bersikap tidak jujur adalah suatu kemaksiatan (Prof. DR. Wahbah, 2013, 15).

Perilaku jujur (*shidq*) sangat berkaitan dengan sifat *amanah* (dapat dipercaya). Bila sifat *amanah* dipelihara dengan baik, maka sifat *shidq* tersebut dapat ditegakkan. Dalam hal ini, karakter *shidq* berkaitan dengan proses ketepatan

penyajian laporan keuangan dan segala informasi mengenai laporan itu sendiri. Sementara karakter *amanah* berkaitan dengan komitmen laporan keuangan yang dapat di uji, yang apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda (Usman dan Ida, 2012, 10).

Pengendalian *shidq* dan *amanah* dilakukan dengan membangun sistem pengawasan. Sistem kontrol atau pengawasan ini harus diimplementasikan dengan sangat tegas dan didukung oleh supremasi hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Pengawasan terhadap penyajian laporan keuangan merupakan suatu kewajiban karena penerapan *shidq* dan *amanah* tidak akan berjalan, tanpa adanya pengawasan. Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya transparansi.

Dalam Islam pengawasan berfungsi sebagai pengendalian atas pertanggungjawaban yang dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Dalam hal ini, sikap tanggungjawab yang melekat dalam setiap pribadi muslim tersebut, akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Adapun pertanggungjawaban yang dilakukan terdiri atas mekanisme penyusun laporan keuangan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas menyusun laporan keuangan secara jujur, ketepatanwaktuan penyelesaian laporan keuangan dan bersikap netral.

Henny (2016) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan. Selain itu Agus (2011) juga menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan. Disamping itu, penelitian Fadillah dan Kamillah (2011) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan. Ketidakkonsistenan mengenai pengaruh kompetensi terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan menyebabkan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kompetensi operator SAI.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Instansi berpengaruh terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan, yaitu penelitian dari Darwanis dan Rahman (2013), Fadillah dan Kamillah (2011), dan Henny (2016). Namun ada penelitian yang lain tidak menemukan bukti bahwa SAI berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan yaitu Agus (2011). Ketidakkonsistenan hasil penelitian terutama mengenai peranan variabel Sistem Akuntansi Instansi sebagai variabel independen yang dapat langsung mempengaruhi Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan menyebabkan dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai Sistem Akuntansi Instansi.

Mengingat pentingnya Kompetensi dan SAI dalam menghasilkan Laporan Keuangan pemerintah yang merupakan bagian dari tanggung jawab yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah (akuntabilitas), maka peneliti tertarik memilih penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI OPERATOR SAI DAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) TERHADAP KUALITAS PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN**

**KEUANGAN DAN TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM
(Studi Kasus pada Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri RI)”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh Kompetensi Operator SAI terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan?
- b. Bagaimana pengaruh Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan?
- c. Bagaimana Kompetensi Operator SAI dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan ditinjau dari Sudut Pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kompetensi Operator SAI berpengaruh terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sistem Akuntansi Instansi (SAI) berpengaruh terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan.

- c. Untuk mengetahui bagaimana Kompetensi Operator SAI dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan ditinjau dari Sudut Pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi Organisasi Pemerintah
Untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri guna meningkatkan kualitas pertanggungjawaban laporan keuangannya.
- b. Bagi Akademisi
Untuk melihat pengaruh kompetensi operator SAI dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan.
- c. Bagi Masyarakat Umum
Untuk melihat dan menilai laporan keuangan dari kementerian yang bersangkutan serta kebutuhan transparansi mengenai pencapaian kerja dari kementerian tersebut.